

Politik Identitas dan Polarisasi Dalam Pemilu

Alfi Rahmadhani¹ Febrinata Silvianna Br Tarigan² Loveyanni Marito Benedikta Gorat³
Novi Novani Sinaga⁴ Frans Pratamarifai Doya Zai⁵

Program Studi Teknologi Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri
Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: alfirahma.5231151021@mhs.unimed.ac.id¹

febrinata.5231151017@mhs.unimed.ac.id² loveyanni.5231151019@mhs.unimed.ac.id³

novisinagaa.5233351032@mhs.unimed.ac.id⁴

frans.5233351021@mhs.unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi dan dampak politik identitas dan polarisasi dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Politik Identitas merupakan fenomena yang semakin menonjol dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), terutama di negara-negara dengan masyarakat yang beragam. Polarisasi dalam konteks pemilu merujuk pada meningkatnya perbedaan tajam antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda. Etnis dan agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat atau dipolitisasi oleh sekelompok orang untuk kepentingannya. Politik identitas dan polarisasi dalam pemilu adalah tantangan yang serius bagi banyak negara. Menciptakan kesadaran akan perlunya toleransi, dialog, dan pendekatan inklusif dalam politik sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung proses demokrasi yang sehat. Dengan demikian, meskipun politik identitas akan tetap ada dalam dinamika pemilihan umum, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan persatuan bangsa demi masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Politik Identitas, Polarisasi, Pemilu, Etnis, Agama

Abstract

This study aims to identify the definition and impact of identity politics and polarization in elections. This study uses a descriptive research method. Identity politics is an increasingly prominent phenomenon in the context of general elections (elections), especially in countries with diverse societies. Polarization in the context of elections refers to the increasing sharp differences between groups of people who have different political views. Ethnicity and religion are part of identity that are often instrumented or politicized by a group of people for their own sake. Identity politics and polarization in elections are serious challenges for many countries. Creating awareness of the need for tolerance, dialogue, and an inclusive approach to politics is essential for maintaining social stability and supporting a healthy democratic process. Thus, although identity politics will remain in the dynamics of general elections, it is important for all parties to commit to the principles of democracy and national unity for a better future.

Keywords: Identity Politics, Polarization, Elections, Ethnicity, Religion



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan melalui mekanisme pemilihan yang adil dan transparan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena politik identitas dan polarisasi semakin mencuat sebagai isu yang signifikan dalam kontestasi elektoral di berbagai negara, termasuk Indonesia. Politik identitas telah menjadi salah satu aspek paling dominan dalam dinamika politik di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks Pemilu, politik identitas sering kali memicu polarisasi yang mendalam di antara masyarakat, membawa

konsekuensi signifikan bagi stabilitas sosial dan demokrasi. Politik identitas merujuk pada penggunaan atribut-atribut tertentu, seperti agama, etnisitas, ras, atau kelompok sosial lainnya, sebagai basis mobilisasi dukungan politik. Fenomena ini sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperkuat basis pemilih dengan memanfaatkan sentimen emosional yang melekat pada identitas kelompok. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan partisipasi politik, ia juga membawa risiko serius, yakni polarisasi sosial dan politik di masyarakat. Politik Identitas merupakan fenomena yang semakin menonjol dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), terutama di negara-negara dengan masyarakat yang beragam. Di Indonesia, politik identitas sering kali digunakan sebagai strategi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan politik dengan memanfaatkan identitas seperti suku, agama, dan ras. Hal ini menciptakan polarisasi di kalangan pemilih, yang dapat memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam masyarakat. Menurut Abdillah (2002), politik identitas adalah upaya untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, baik itu etnis, agama, maupun gender.

Polarisasi dalam konteks pemilu merujuk pada meningkatnya perbedaan tajam antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda. Polarisasi yang berakar pada politik identitas dapat menyebabkan fragmentasi sosial, menurunkan kualitas diskursus politik, dan memperburuk ketegangan antarkelompok. Dalam beberapa kasus, polarisasi bahkan dapat berujung pada konflik sosial yang mengancam stabilitas politik dan harmoni sosial. Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terbelah menjadi dua atau lebih kelompok dengan pandangan, nilai, dan kepentingan yang sangat berbeda. Dalam banyak kasus, polarisasi ini dipicu oleh narasi-narasi politik yang memanfaatkan isu-isu identitas untuk mengeksploitasi perbedaan di antara kelompok. Hal ini bisa meningkatkan mobilisasi suara berbasis identitas tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan, konflik, dan bahkan kekerasan antar kelompok yang berbeda. Polarisasi yang terjadi akibat politik identitas dapat menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ketika identitas kelompok dipolitisasi, masyarakat cenderung terpecah menjadi dua kubu yang saling berlawanan, sehingga mengurangi kemungkinan dialog dan kerjasama antar kelompok. Politik identitas memiliki potensi untuk menjadi alat pemberdayaan bagi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, hal ini juga berisiko menimbulkan polarisasi yang merugikan stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menyikapi isu ini secara kritis dan mengedepankan dialog serta toleransi dalam menghadapi perbedaan identitas di masyarakat.

Salah satu contoh nyata dari fenomena ini terlihat dalam berbagai Pemilu di Indonesia, di mana partai politik dan kandidat sering kali menggunakan simbolisme identitas untuk menarik dukungan. Dalam prosesnya, isu-isu yang berdasarkan identitas ini tidak hanya membentuk pilihan politik individu, tetapi juga mengubah cara masyarakat berinteraksi dan memahami satu sama lain. Akibatnya, ketidakpercayaan dan stereotip antara kelompok dapat menguat, yang selanjutnya memperburuk polarisasi. Studi tentang politik identitas dan polarisasi menjadi semakin relevan, terutama di era digital, di mana media sosial berperan signifikan dalam menyebarkan narasi politik yang berbasis identitas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang bagaimana demokrasi dapat tetap berfungsi dengan baik di tengah maraknya eksploitasi identitas dan tingginya tingkat polarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika politik identitas dan polarisasi dalam pemilu, serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi dan integrasi sosial. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana politik identitas mempengaruhi hasil Pemilu, serta peran media dan teknologi dalam memperkuat atau meredakan polarisasi. Selain itu, kita akan mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena ini, dengan

harapan dapat menciptakan ruang bagi dialog dan kerjasama antar kelompok dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Kenali tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perjalanan menuju pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

Kajian Teori

Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri utama sistem politik yang demokratis. Melalui pemilihan umum sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Jangka waktu setiap periodik berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lain (Muhammad 2019). Menurut (Sulaiman and Rohaniah 2023), sistem pemilu yang digunakan memainkan peran penting dalam mencapai representasi politik yang proporsional dan inklusif. Dalam konteks teori demokrasi, pemilu dianggap sebagai instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Teori ini menekankan bahwa pemilu memungkinkan rakyat menilai kinerja pemimpin dan memilih calon yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip inklusivitas dalam pemilu adalah pemilu memastikan bahwa semua orang berkesempatan untuk ikut serta di dalamnya (Permatasari 2023). Sistem pemilu di Indonesia yang menggunakan kombinasi proporsional terbuka juga mencerminkan kompleksitas dalam proses elektoral di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan (Setiawan 2014). Pemilu merupakan sebuah momentum yang memiliki nilai berita tinggi sehingga berita mengenai peristiwa Pemilu selalu menjadi sajian utama media massa, tak terkecuali tentang perilaku politik para elitnya (Prasetyo et al. 2014). Pemilihan umum yang dijadikan tonggak demokrasi akan membimbing bangsa dan negara menuju keberhasilan demokrasi dan membangun peradabannya (Al-aziz et al. 2024).

Politik

Secara umum, politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, pembuatan keputusan kolektif, dan pengaturan konflik di dalam Masyarakat. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada Masyarakat (Fatimah 2018). Dengan pendekatan yang beragam, teori politik membantu menganalisis isu-isu seperti kekuasaan, legitimasi, konflik, konsensus, dan perubahan sosial. Menurut (Marx & Engels, 1848), politik sebagai arena perjuangan kelas. Negara dipandang sebagai instrumen dominasi kelas kapitalis terhadap kelas pekerja. Dalam politik Indonesia kontemporer, tidak banyak partai politik yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap ideologi partai serta rekrutmen yang khusus dan seleksi yang ketat terhadap kader-kadernya. Berbeda dengan wajah politik Indonesia pada Orde Lama maupun Orde Baru yang mengedepankan perilaku doktriner partai politik. (Indrayani 2012).

Politik Identitas

Sejarah Indonesia adalah sejarah politik identitas. sejarah itu sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan (Samosir and Novitasari 2024). Menurut Charles Taylor (1994), politik identitas berakar pada kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengakuan (recognition). Identitas seseorang atau kelompok sering kali dibentuk melalui interaksi sosial dan pengakuan oleh pihak lain. Jika pengakuan ini tidak terjadi, individu atau kelompok dapat merasa terpinggirkan, yang kemudian mendorong perjuangan politik untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Isu politik identitas yang mewarnai ranah politik di Indonesia banyak dibahas di media online Indonesia (Biela 2025). Etnis dan agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat atau dipolitisasi oleh sekelompok orang untuk kepentingannya (Syariah 2021). Isu politik

identitas atas nama agama semakin menguat dan mencemaskan mulai pemilu presiden nasional tahun 2014 ketika Presiden incumbent tidak lagi berhak mencalonkan diri sesuai dengan aturan dalam UUD 1945 (Samosir and Novitasari 2024). Politik identitas adalah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara identitas sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika politik.

Polarisasi

Polarisasi adalah fenomena multidimensional yang melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis. Di tengah polarisasi tersebut, muncul sejumlah poros politik atau kekuatan politik baru, diantaranya kekuatan politik Islam, terutama yang terlihat di partai-partai Islam (Al-aziz et al. 2024). Polarisasi politik di kalangan milenial telah menjadi tantangan yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir (Politik, Milenial, and Komunikasi 2024). Polarisasi di Indonesia sering kali berakar pada politik identitas, terutama selama pemilu atau isu-isu agama dan etnis. Studi menunjukkan bahwa polarisasi ini diperburuk oleh penggunaan media sosial untuk menyebarkan disinformasi dan narasi yang memecah belah. Menurut Karl Marx, dalam perspektif konflik kelas, polarisasi muncul karena pertentangan antara kelas sosial yang berbeda, terutama antara pemilik modal dan pekerja. Polarisasi merupakan fenomena populer yang lebih banyak berkembang di tingkat massa ketimbang di tingkat elite politik (Annas, Nailan, and Aji 2019). Polarisasi juga membuat salah satu kelompok memiliki pemikiran bahwa pandangannya yang lebih benar ketimbang kelompok yang lain karena alasan pandangan politik serta moralitasnya (Pki 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis politik identitas dan polarisasi dalam pemilu. Penelitian deskriptif ini akan mengumpulkan data dan informasi mengenai politik identitas dan polarisasi, termasuk elemen-elemen kunci dari politik identitas dan polarisasi, bagaimana politik identitas mempengaruhi hasil Pemilu, serta peran media dan teknologi dalam memperkuat atau meredakan polarisasi. Selain itu, kita akan mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena ini. Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi berbagai aspek politik identitas dan polarisasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan karakter bangsa, serta menganalisis contoh-contoh nyata dari politik identitas dan polarisasi yang mempengaruhi pemilu. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai politik identitas dan polarisasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik identitas Pemilu 2019 telah meninggalkan jejak trauma psikologis terhadap masyarakat pemilih dengan korban 4 orang anak meninggal, 172 orang terluka dan 74 ditangkap paksa dalam demonstrasi yang rusuh di kantor Badan Pengawas Pemilu (Tirto, 2019). Dampak psikologis social yang mencekam dari politik identitas terutama atas nama agama telah terjadi sejak Pemilihan Umum 2014 dan berpuncak di Pemilu 2019. Masyarakat minoritas khususnya Nasrani muak dengan Pemilihan Umum karena sangat kental dengan politik identitas agama (Samosir and Novitasari 2024). Penelitian menunjukkan bahwa politik identitas sering kali memicu polarisasi yang tajam selama pemilu. Polarisasi ini terlihat dalam pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti agama, etnis, atau pandangan ideologis. Misalnya, dalam beberapa kasus pemilu, muncul narasi "kita vs. mereka" yang memperkuat pembagian sosial dan memperkeruh hubungan antarindividu maupun kelompok. Misalnya, dalam pemilu di beberapa negara, termasuk di

Indonesia, politik identitas sering terlihat dalam bentuk kampanye yang menonjolkan perbedaan agama atau etnis. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan di antara kelompok yang berbeda dan mengarah pada polarisasi yang kuat. Politik identitas di Indonesia telah menjadi fenomena yang signifikan dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dalam Pemilu 2024, isu-isu yang berkaitan dengan identitas etnis, agama, dan budaya kembali muncul sebagai alat mobilisasi politik. Sejarah menunjukkan bahwa politik identitas sering kali digunakan untuk memperkuat dukungan dari kelompok tertentu, seperti terlihat pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019. Pada saat itu, identitas agama menjadi faktor kunci yang memengaruhi pemilih, dengan kelompok-kelompok tertentu menggunakan simbol-simbol agama untuk menarik dukungan. Media sosial menjadi katalis dalam memperkuat politik identitas dan polarisasi. Algoritma media sosial yang mendorong konten emosional telah memfasilitasi penyebaran informasi yang memecah belah. Disinformasi dan ujaran kebencian sering kali digunakan untuk memperkuat narasi identitas tertentu, yang memperburuk konflik sosial selama proses pemilu. Munculnya politik identitas agama (Islam) karena simbol-simbol keagamaan dipercaya dapat meningkatkan popularitas, serta tingkat penerimaan dengan cara menyentuh sisi emosional umat (Samosir and Novitasari 2024). Polarisasi yang muncul akibat politik identitas tidak hanya terjadi di tingkat politik, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial masyarakat. Polarisasi memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok lain dan menciptakan jarak sosial yang sulit dijembatani. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk konflik horizontal di masyarakat. Polarisasi yang dihasilkan oleh politik identitas dapat memiliki dampak yang luas pada masyarakat. Dalam konteks Pemilu, polarisasi ini sering kali menyebabkan pembagian masyarakat menjadi dua kubu yang saling berlawanan, menciptakan ketegangan dan konflik. Misalnya, pada Pemilihan Presiden 2019, isu-isu terkait agama dan etnis memicu perpecahan di antara pemilih, yang berujung pada peningkatan sentimen negatif terhadap calon-calon tertentu. Polarisasi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat menjadi terpecah-pecah, dengan masyarakat sulit untuk menemukan kesamaan di antara kelompok yang berbeda, yang berujung pada konflik dan ketegangan sosial.

Polarisasi yang dipicu oleh politik identitas dapat mengancam stabilitas demokrasi. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang kompetisi ide dan kebijakan sering kali berubah menjadi arena konflik berbasis identitas. Beberapa pemilih mungkin merasa tidak terwakili atau terasing dari proses politik, sehingga mengurangi partisipasi pemilih yang dapat memengaruhi legitimasi pemilu. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Politik identitas dan polarisasi dalam pemilu adalah tantangan yang serius bagi banyak negara. Menciptakan kesadaran akan perlunya toleransi, dialog, dan pendekatan inklusif dalam politik sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung proses demokrasi yang sehat. Meskipun politik identitas tetap menjadi bagian dari dinamika pemilu di Indonesia, penting bagi semua pihak untuk berupaya menciptakan suasana politik yang lebih inklusif dan konstruktif guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Politik identitas dan polarisasi dalam pemilu merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak signifikan terhadap masyarakat dan demokrasi. Meskipun politik identitas dapat menjadi alat untuk memperjuangkan hak kelompok tertentu, penggunaan yang berlebihan dan manipulatif berisiko memperburuk perpecahan sosial.

KESIMPULAN

Politik identitas dan polarisasi dalam pemilu adalah fenomena yang saling terkait dan berdampak signifikan terhadap dinamika politik dan sosial. Politik identitas sering digunakan oleh partai politik dan kandidat untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, agama, atau kategori identitas lainnya. Namun, strategi ini sering kali memicu

polarisasi, memperkuat perpecahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Dengan demikian, meskipun politik identitas akan tetap ada dalam dinamika pemilihan umum, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan persatuan bangsa demi masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-aziz, Muhammad Irfan, Siti Fatimah, Fakultas Syari, U. I. N. Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. 2024. "Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam." 03(2):240–53. doi: 10.32332/siyasah.v4i1.
- Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan, and Asep Aji. 2019. "Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial." 20(2):111–22.
- Biela, Bening Salsa. 2025. "Analisis Kolokasi Pada Wacana Tentang Politik Identitas Di Media Online Indonesia." 4(2):282–91.
- Siti Fatimah. 2018. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu." Resolusi: Jurnal Sosial Politik 1(1):5–16. doi: 10.32699/resolusi.v1i1.154.
- Indrayani, Inri Inggrit. 2012. "Media Dan Politik Citra Dalam Politik Indonesia Kontemporer." Scriptura 3(2):129–39. doi: 10.9744/scriptura.3.2.129-139.
- Muhammad, Muhammad. 2019. "Akuntabilitas Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Dan Beradab." ADIL: Jurnal Hukum 3(1):123–40. doi: 10.33476/ajl.v3i1.837.
- Permatasari, Mezaluna Indy. 2023. "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal." Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) 9(2):81–91. doi: 10.20473/jpi.v9i2.50762.
- Pki, Dari Keturunan. 2022. "Polarisasi Politik : Pro Kontra Warga Mengenai Isu Rekrutmen TNI." 1(2):117–42.
- Politik, Mengurai Polarisasi, Kalangan Milenial, and Peran Komunikasi. 2024. "R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal." 6:4580–93. doi: 10.47476/reslaj.v6i10.2980.
- Prasetyo, Bagus, Bagus Prasetyo, Jurnalis Tempo, Pemerhati Ilmu Komunikasi, Perilaku Politik, Elite Politik, Budaya Jawa, and Panji Koming. 2014. "Menyimak Pemilu Dan Perilaku Elite Politik Dalam Abstrak Pendahuluan Rumusan Masalah Tujuan Penelitian."
- Samosir, Osbin, and Indah Novitasari. 2024. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas : Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." 2(3):332–46.
- Setiawan, Muhammad Akbar. 2014. "Memahami Pemilu Dan Gerakan Politik Kaum Difabel." Inklusi 1(1):129. doi: 10.14421/ijds.010107.
- Sulaiman, Baihaki, and Yoyoh Rohaniah. 2023. "Analisis Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka." PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora 4(2):88–105. doi: 10.32509/petanda.v4i2.3319.
- Syariah, Fakultas. 2021. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." 1(1).